

REORIENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT DI JAWA BARAT*

Atih Rohaeti Dariah*

Abstrak

Rendahnya daya beli masyarakat saat ini menarik untuk dikaji, faktor-faktor apa yang menentukannya dan bagaimana rancangan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa indikator makroekonomi, ditemukan, bahwa pola pertumbuhan ekonomi yang sudah berlangsung lama sampai saat ini bias pada sektor industri pengolahan yang padat modal dan teknologi tinggi, sementara sebagian besar masyarakat masih bergelut di sektor pertanian. Hasil simulasi perhitungan dengan menggunakan metoda SAM (Social Accounting Matrices) memperlihatkan, bahwa sektor jasa-jasa, sektor industri makanan dan minuman, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor pertanian akan berdampak signifikan pada perbaikan daya beli masyarakat Jawa Barat jika mereka tumbuh. Berdasarkan hasil survey, ternyata kunci pengembangan kelima sektor ekonomi tersebut adalah inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan, dan iklim usaha yang kondusif. Dalam hal ini pemerintah, harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi.

Kata kunci: Daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan kelembagaan

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mengisi agenda pembangunannya ke depan, Jawa Barat memiliki visi ‘**Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010**’. Visi tersebut merupakan hasil eksplorasi secara parsipatif yang melibatkan masyarakat Jawa Barat, yang selanjutnya dituangkan dalam

* Naskah Pemenang Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2006/2007

* **Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si.**, adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba.

Peraturan Daerah No 1 tahun 2003. Ukuran keberhasilan pencapaian visi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada tahun 2010. IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Lain kata, pembentuk IPM adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

Dengan penancangan visi seperti ini memperjelas arah dan tujuan pembangunan termasuk besaran angka yang harus dicapai, yakni berapa besar angka indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli harus terbentuk agar IPM 80 dapat terealisasi? Angka IPM 80 sudah menggambarkan struktur sosial ekonomi masyarakat yang tinggi kesejahteraannya, artinya kebutuhan dasar hidup terpenuhi dengan akses yang mudah dan terjangkau. Dengan menggunakan terminologi makroekonomi, performa ini dicerminkan oleh tingginya pendapatan perkapita, rendahnya tingkat kemiskinan, meratanya distribusi pendapatan, dan sedikitnya jumlah pengangguran sehingga bisa menikmati pendidikan sebagaimana mestinya dan memiliki harapan hidup yang tinggi.

Konsekuensi dari penancangan visi tersebut, perlu reformulasi strategi pembangunan beserta perubahan kelembagaannya. Pemerintah Propinsi Jawa Barat tampaknya sudah berupaya untuk merubah beberapa paradigma pengelolaan wilayahnya dalam rangka mendukung pencapaian visi Jawa Barat. Mereka mencanangkan visi untuk tahun 2003-2008 yakni **‘Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat Tahun 2010’**, yang mengarah pada upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi (daya beli). Ada lima isu utama yang tercakup dalam visi Pemerintah Propinsi Jawa Barat yakni kependudukan dan kualitas SDM, pembangunan ekonomi, manajemen pemerintahan, pengelolaan lingkungan, dan kehidupan sosial-budaya-agama. Kelima isu tersebut saling terkait, saling mempengaruhi dan saling menopang untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.

Untuk sementara sampai tahun 2005, pencapaian visi tersebut belum optimal artinya tidak sesuai target karena kinerja salah satu indeks yang paling menentukan IPM yakni indeks daya beli justru angkanya tidak mengembirakan. Informasi selengkapnya tentang pencapaian IPM dan indikator makroekonomi lainnya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2003 – 2005

	Indikator	Tahun		
		2003	2004	2005
1	IPM	67,87	68,36	69,35
2	Indeks Pendidikan	78,40	79,02	79,59
	<i>Angka melek huruf (%)</i>	93,60	93,96	94,52
	<i>Rata-rata lama sekolah (tahun)</i>	7,20	7,37	7,46
3	Indeks Kesehatan	66,57	67,23	69,28
	<i>Angka Harapan Hidup (tahun)</i>	64,94	65,34	66,57
4	Indeks Daya Beli	58,63	58,83	59,18
	<i>Purchasing Power Parity (Rp)</i>	553.699	554.570	556.100
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,25	2,64	2,10
6	Penduduk Miskin (%)	27,81	27,51	28,29
7	Pengangguran (%)	12,69	12,25	11,91
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,39	5,08	5,31
9	Jumlah Investasi (triliyun Rp)	36,51	40,52	61,44

Sumber: BPS Jawa Barat, diolah Bapeda Propinsi Jawa Barat

Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan realisasi yang cukup signifikan. Pada periode tahun 2003-2004 terjadi peningkatan sebesar 0,49 poin dan periode tahun 2004-2005 sebesar 0,99 poin. Dari ketiga indeks, nampak bahwa indeks daya belilah yang paling rendah dan peningkatannya pun kurang menggembirakan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan daya beli dalam kerangka IPM perlu menjadi fokus perhatian, dengan tetap tidak mengesampingkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan manusia.

1.2 Perumusan Masalah

Mencermati perkembangan pencapaian IPM Jawa Barat yang kurang menggembirakan dari aspek indeks daya beli, memunculkan perhatian mengapa pencapaian indeks daya beli relatif rendah dibandingkan dengan kedua indeks lainnya. Oleh karena itu dalam tulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menentukan rendahnya daya beli masyarakat Jawa Barat?
2. Bagaimanakah rancangan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan rendahnya daya beli masyarakat Jawa Barat
2. Menjabarkan beberapa skenario rancangan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat

Tulisan ini diharapkan bermanfaat terutama bagi para pembuat kebijakan sebagai alternatif pilihan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat.

2 Faktor-Faktor Penentu Daya Beli

2.1 Metode Perhitungan Daya Beli

Daya beli masyarakat merupakan hal yang krusial dalam proses pembangunan ekonomi, karena menyangkut kemampuan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Gambaran daya beli masyarakat di suatu wilayah dapat menjadi sinyal sejauhmana keberhasilan pembangunan ekonomi, karena rendahnya daya beli identik dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran.

Ada beberapa tahap untuk menentukan estimasi daya beli (UNDP, 2001) yakni:

1. Menghitung pengeluaran per kapita dari data modul susenas [=Y] ;
2. Menaikkan nilai Y sebesar 20% [=Y₁] , karena dari berbagai studi diperkirakan bahwa data dari Susenas cenderung lebih rendah sekitar 20%;
3. Menghitung nilai riil Y₁ dengan mendeflasi Y₁ dengan indeks harga konsumen (CPI) [=Y₂];
4. Menghitung nilai daya beli-*Purchasing Power Parity (PPP)*- untuk tiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relatif terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar, yaitu Jakarta Selatan. Paritas daya beli dihitung dengan metode yang juga digunakan oleh *International Comparison Project* dalam menstandarisasi PDB (Produk Domestik Bruto) untuk perbandingan antar negara. Perhitungan didasarkan pada harga 27 komoditas yang ditanyakan pada modul konsumsi SUSENAS. Harga di Jakarta Selatan digunakan sebagai standar harga.
5. Membagi Y₂ dengan PPP untuk memperoleh nilai rupiah yang sudah disetarakan antar daerah [=Y₃];
6. Mengurangi nilai Y₃ dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli [=Y₄]. Formula Aktinson yang digunakan untuk menyesuaikan nilai Y₃ adalah:

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C(i) \\
 &= Z + 2(C(i)-Z)^{(1/2)} \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C(i) - 2Z)^{(1/3)} \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C(i) - 3Z)^{(1/4)}
 \end{aligned}$$

Dimana C adalah PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita dan Z adalah batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar 549.500 rupiah per kapita per tahun.

2.2 Faktor-Faktor Penentu Daya Beli

Berdasarkan pengertian dan tahapan estimasi daya beli, nampak bahwa terdapat dua pilar penentu daya beli masyarakat yakni pendapatan dan inflasi. Pilar pertama terkait dengan kemampuan mendapatkan sejumlah

uang, sedangkan pilar kedua menyangkut kinerja makroekonomi aspek stabilitas harga. Ketika harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan atau terjadi inflasi, maka kemampuan mendapatkan barang-barang akan menurun jika besarnya pendapatan tetap. Agar daya beli tetap maka harus terjadi kenaikan pendapatan yang melebihi besarnya tingkat inflasi. Kondisi yang lebih baik adalah pendapatan terus meningkat di satu sisi dan terjadi stabilitas harga yang memuaskan di sisi lain.

Mengupas pilar pertama yakni pendapatan, beberapa buku teks ilmu ekonomi (diantaranya *Economics*, Krugman dan Wells, 2006) mengungkapkan bahwa dalam siklus ekonomi adanya pendapatan karena adanya kontribusi jasa tenaga kerja dari rumah tangga (*household*) terhadap kegiatan produksi di perusahaan (*firm*). Hal ini secara implisit mengisyaratkan bahwa sumber pendapatan adalah karena adanya kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam nomenklatur ekonomi kenaikan nilai riil total barang dan jasa menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi. Mekanisme ini mengantarkan pada suatu kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kondisi prasyarat (*necessary condition*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana dilansir oleh Iwan J. Azis. Azis menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi regional dan investasi adalah kunci untuk mencapai kinerja yang baik pada era desentralisasi. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman di beberapa negara ternyata politik dan kelembagaan memainkan peran yang sangat penting pula terhadap kinerja makroekonomi sehingga perlu terus melakukan inovasi kebijakan dan mengembangkan kelembagaan dari yang sudah ada (Azis, 2006).

Pemikiran Iwan J. Azis tersebut selaras dengan pengamatan Joseph E. Stiglitz, bahwa saat ini tidak hanya pengakuannya yang meluas pada pentingnya peranan kelembagaan namun kelembagaan sudah bergeser menjadi garda terdepan dan menjadi pusat (*front and center*) dalam memahami bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana mengembangkan kinerja perekonomian (Stiglitz, 2000). World Bank (2002) mendefinisikan institusi sebagai aturan dan organisasi, termasuk kaidah informal yang memfasilitasi koordinasi perilaku manusia.

Berdasarkan rangkaian pemikiran di atas, maka pertumbuhan ekonomi, investasi dan kelembagaan menjadi variabel yang terintegrasi yang akan menentukan besarnya pendapatan masyarakat dan bagaimana pendapatan tersebut terdistribusikan diantara seluruh pelaku ekonomi.

Pilar kedua yakni inflasi, beberapa buku teks ilmu ekonomi (diantaranya Mankiw, 2000) membahas bahwa besar kecilnya inflasi ditentukan oleh sisi permintaan, penawaran, kebijakan pemerintah dan ekspektasi. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat disaat penawaran tetap, atau permintaan tetap namun ketersediaan barang di pasar berkurang maka harga akan terdorong naik. Problem dibalik stok barang yang tidak mencukupi bisa terjadi karena naiknya biaya produksi dan atau terganggunya distribusi barang. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan penetapan harga beberapa komoditi yang bersifat strategis seperti BBM, tarif dasar listrik, setiap terjadi kenaikan harga komoditas ini telah menimbulkan dampak berantai terhadap kenaikan harga barang-barang lainnya sehingga menghasilkan angka inflasi yang tinggi dan menggerogoti daya beli masyarakat. Ekspektasi yakni perkiraan terhadap laju inflasi di waktu mendatang ternyata berpengaruh pula terhadap inflasi yang terbentuk. Hasil studi ISEI Cabang Bandung dengan BI Bandung menunjukan bahwa ekspektasi inflasi memberikan kontribusi yang dominan dalam pembentukan inflasi di Jawa Barat, yakni pada kisaran 50 – 75% dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perlu pengelolaan ekspektasi melalui kerangka kebijakan yang tepat (BI Bandung, 2005).

3 Faktor-Faktor Yang Menentukan Rendahnya Daya Beli Masyarakat Jawa Barat

Berdasarkan studi literatur terungkap bahwa faktor penentu daya beli masyarakat adalah besarnya pendapatan dan tingkat inflasi. Dalam bab ini akan dibahas bagaimanakah distribusi sektor ekonomi, tenaga kerja yang terserap, investasi per sektor ekonomi sebagai variabel determinan pendapatan. Tabel 2 menyajikan perkembangan variabel-variabel tersebut.

Tabel 2
Pola PDRB, Tenaga Kerja Dan Investasi Di Jawa Barat
Tahun 2003 – 2005

No	Variabel Makroekonomi	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,39	5,08	5,31
2	Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB (%)	13,43	13,15	12,85
	- Sektor Pertanian	42,58	40,44	41,18
	- Sektor Industri Pengolahan	33,13	34,25	34,46
	- Sektor Jasa			
3	Distribusi Tenaga Kerja Per Sektor (%)	34,87	29,82	31,23
	- Sektor Pertanian	15,96	17,60	17,89
	- Sektor Industri Pengolahan	49,17	52,58	50,87
	- Sektor Jasa dan lainnya			
4	Distribusi Investasi Per Sektor (%)	3,78	4,24	2,93
	- Sektor Pertanian	41,94	42,23	36,35
	- Sektor Industri Pengolahan	54,28	53,53	60,72
	- Sektor Jasa dan lainnya			
5	Inflasi (%)	5,69	7,12	18,51
6	PDRB/kapita riil (Juta rupiah)	5,823	5,997	6,119
7	Penduduk Miskin (%)	27,81	27,51	28,29
8	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,25	2,64	2,10
9	<i>Purchasing Power Parity (Rp)</i>	553.699	554.570	556.100

Sumber: BPS Jawa Barat dan BI Bandung, diolah kembali

Keterangan: PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat jawa barat)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama tiga tahun terakhir menunjukan peningkatan yang menggembirakan. Pada saat yang bersamaan tingkat inflasi pun berkisar pada angka yang terkendali kecuali tahun 2005 karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Daya beli masyarakat Jawa

Barat pada tahun 2005 (penghitungan dilakukan pada pertengahan tahun) sebesar Rp 556.100, belum memperhitungkan besarnya inflasi dampak dari kenaikan harga BBM. Dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap dan dengan memperhitungkan inflasi Juni-Desember 2005 mencapai 14,22% (6 bulan), maka daya beli masyarakat akhir tahun 2005 menjadi Rp 486.887, lebih rendah dari daya beli di tahun 2004 (BI Bandung, 2006).

Kinerja yang lebih baik terjadi untuk tahun 2004 dimana pertumbuhan ekonomi naik signifikan dari 4,39% menjadi 5,08%, sementara inflasi relatif rendah yakni sebesar 7,12%, sehingga PDRB riil per kapita pun naik signifikan dari 5,823 juta rupiah menjadi 5,997 juta rupiah padahal laju pertumbuhan penduduk tahun 2004 relatif tinggi yakni 2,64%. Namun ternyata kinerja yang sangat positif tersebut kurang berdampak terhadap peningkatan daya beli, bisa dilihat di tabel bahwa kenaikan daya beli tipis sekali. Fakta ini diperkuat oleh masih tingginya persentase tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian dan juga tingginya persentase penduduk miskin. Berdasarkan data dari SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi) Jabar diketahui bahwa golongan rumah tangga terbesar jumlahnya dan terendah pendapatannya adalah buruh tani. Jadi mereka yang masih bergelut di sektor pertanian sebagai buruh tani sangat rentan dengan status miskin secara ekonomi. Selain buruh tani jumlah golongan rumah tangga terbesar kedua jumlahnya dan terendah kedua pendapatannya adalah rumah tangga bukan pertanian golongan bawah di desa dan di kota seperti buruh, pedagang kecil, tukang beca, tukang cukur dan sejenisnya.

Fenomena perekonomian tahun 2004 ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena angka pertumbuhan tinggi namun tidak mampu mensejahterakan masyarakat kebanyakan. Artinya, pertumbuhan ekonomi hanya meningkatkan kesejahteraan sekelompok masyarakat tertentu dan sebaliknya masyarakat marginal sebatas menjadi penonton. Masyarakat marginal memiliki akses yang terbatas terhadap aktivitas ekonomi produktif, artinya peluang untuk berpartisipasi dan mengembangkan usaha relatif kecil baginya. Keterbatasan tersebut lebih karena lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) dalam transaksi ekonomi yang bisa terjadi karena rendahnya kapasitas diri dan atau sistem yang rigid dan tidak pro masyarakat miskin.

Jika dicermati variabel lainnya dalam tabel di atas yakni distribusi investasi per sektor ekonomi dan kontribusi sektoral terhadap total PDRB dapat memberikan informasi lebih dalam. Struktur ekonomi Jawa Barat

sudah didominasi oleh sektor industri pengolahan, hal ini diperkuat oleh tingginya alokasi investasi di sektor tersebut. Struktur industri yang berkembang didominasi sektor industri alat angkut, mesin dan peralatannya yang bersifat padat modal dan berbasis teknologi. Dengan demikian terjadi gap antara dominasi sektor ekonomi dengan dominasi tenaga kerjanya serta dominasi investasi. Tenaga kerja mayoritas bergelut di sektor pertanian, sedangkan alokasi investasi untuk sektor ini sangat kecil sehingga besarnya investasi per tenaga kerja sangat rendah. Dampaknya, output per tenaga kerja pun rendah atau rasio jumlah tenaga kerja per 1 juta rupiah nilai output (koefisien tenaga kerja) relatif besar dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa koefisien tenaga kerja tertinggi terjadi di sub sektor tanaman pangan yakni 0,279, dibandingkan dengan di industri makanan dan minuman yang hanya 0,01 (BI, 2006). Selain padat modal struktur industri di Jawa Barat pun lebih banyak menggunakan bahan baku impor, termasuk industri tekstil, barang kulit dan alas kaki sebagai industri dominasi kedua. Dengan demikian berkembangnya dominasi sektor industri pengolahan sampai saat ini tidak memiliki keterkaitan yang besar ke belakang dengan sektor pertanian.

Terkait dengan sistem yang rigid dan tidak pro masyarakat miskin menyangkut aspek kelembagaan. Kelembagaan atau institusi adalah aturan dan organisasi, termasuk kaidah informal yang memfasilitasi koordinasi perilaku manusia. Aturan yang masih berkembang sampai saat ini yang terkait dengan akses sumber permodalan misalnya, kebijakan perbankan yang berprinsip kehati-hatian selalu mensyaratkan agunan yang justru sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat golongan bawah yang mau berusaha. Nuansa bisnis perbankan yang menghindari resiko tinggi, kecenderungannya semakin tidak tertarik untuk membiayai usaha sektor pertanian. Harga-harga komoditas pertanian yang berfluktuasi tinggi tidak memberikan prediksi kepastian hasil sehingga menjadi disinsentif untuk terus menggeluti usaha pertanian. Lunturnya kearifan lokal yang sangat positif menjunjung kebersamaan semakin mempersulit eksistensi golongan berpendapatan rendah. Selama seluruh aspek kelembagaan itu statis maka manfaat dari pola pertumbuhan ekonomi yang sudah ada akan tetap mubadzir.

4 Kebijakan Pembangunan Untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Jawa Barat

Dari gambaran tentang faktor-faktor yang menentukan rendahnya daya beli masyarakat Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir, dapat terungkap ada tiga hal mendasar sebagai faktor penentu. Pertama, pola pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan yang padat modal dan bahan baku impor. Kedua, kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM sebanyak dua kali sepanjang tahun 2005. Ketiga, keterbatasan akses golongan masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi produktif.

Untuk masalah yang kedua berada diluar kewenangan dan kontrol pemerintah daerah sehingga tidak akan diurai lebih detil dan dicari solusinya. Dalam konteks otonomi daerah, kajian akan lebih difokuskan pada permasalahan pertama dan ketiga karena sangat relevan dengan pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kedua masalah tersebut menggiring pada upaya reorientasi rencana strategis pola pertumbuhan ekonomi sektoral yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan inovasi kelembagaan yang membuka kesempatan seluas-luasnya partisipasi masyarakat lokal.

Mengacu pada bahasan sebelumnya, terdapat beberapa prinsip yang seyogianya menjadi pertimbangan rumusan kebijakan yakni penetapan target dan sasaran dengan jelas, identifikasi keunggulan dan kelemahan, design sistem insentif dan disinsentif yang bisa diandalkan untuk menjamin kesinambungan aktivitas ekonomi produktif.

Penetapan target dan sasaran, berarti pemerintah daerah perlu memetakan kelompok masyarakat mana, dimana lokasinya, dalam bentuk apa penanganannya agar daya belinya meningkat. Dalam pemetaan (*mapping*) ini perlu dieksploitasi pula motivasi, skill dan kebiasaannya selama ini karena bagaimanapun aspek ini akan melekat dalam menjalani setiap aktivitas.

Dalam mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan, elaborasi secara cermat segala potensi yang dimiliki oleh daerah. Potensi yang dimaksud tidak sebatas sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya modal buatan manusia (*human made capital*) namun juga sumber daya modal sosial (*social capital*). Sumberdaya alam merupakan *endowment factor* yang memiliki berbagai alternatif penggunaan. Sekalipun ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang memiliki kesamaan

sebagai wilayah pertanian, namun masing-masing memiliki keunikan sehingga jika dieksploitasi akan memberikan *value added* yang beragam. Sedangkan modal sosial adalah organisasi sosial (khususnya asosiasi horizontal) seperti jaringan, norma dan kepercayaan (*trust*) yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan (Putnam dalam Kherallah, 2000).

Dalam mengelaborasi kelemahan yang tiada lain berupa evaluasi diri, seyogianya tidak terfokus pada keterbatasan sumberdaya fisik (finansial dan non-finansial) dan sumberdaya manusia, namun juga evaluasi kelembagaan yang sudah ada apakah sudah mencukupi untuk mendukung berjalannya aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak masyarakat lokal.

Dengan pertimbangan kedua prinsip ini maka akan terdapat ragam penanganan sesuai karakteristik lokal masing-masing, dan atmosfer desentralisasi memberikan peluang besar untuk merancang mekanisme insentif dan disinsentif oleh pemerintah setempat. Pemerintah provinsi sebagai *leader* perencanaan pembangunan daerah dalam konteks otonomi daerah sudah selayaknya memberikan arahan jelas dalam rancangan kebijakan tersebut.

Hasil simulasi perhitungan dengan menggunakan metoda SAM (*Social Accounting Matrices*) memperlihatkan bahwa ada lima sektor ekonomi yang diprediksi akan berdampak signifikan pada perbaikan daya beli masyarakat Jawa Barat jika mereka tumbuh. Kelima sektor tersebut adalah sektor jasa-jasa, sektor industri makanan dan minuman, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran dan sektor pertanian (Sunday dan Dariah, 2005).

Survey yang pernah dilakukan ke 124 pelaku usaha yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan mewakili kelima sektor tersebut diketahui beberapa permasalahan krusial. Masalah utama di sektor pertanian adalah masalah kelembagaan yakni pasar dan harga, sehingga membuat banyak pihak frustrasi dan tidak tertarik untuk bergelut di sektor pertanian. Selain itu, aktivitas terbatas pada menanam sehingga nilai tambah komoditas rendah. Dengan demikian membangun sektor pertanian diprioritaskan untuk inovasi aspek kelembagaan yang terkait dengan pasar dan harga, riset pengembangan komoditas yang sesuai dengan kondisi lokal, riset penciptaan nilai tambah komoditas, dan infrastruktur perdesaan. Yang dimaksud dengan inovasi aspek kelembagaan yang terkait dengan pasar dan harga adalah terobosan sistem pemasaran yang bisa meningkatkan posisi tawar petani.

Diantaranya mengembangkan lembaga kerjasama diantara petani, meningkatkan kemitraan dengan sektor industri pengolahan, mengembangkan pasar lelang yang mencakup wilayah dan komoditas.

Karena survey kebetulan dilakukan pasca kenaikan harga BBM Oktober 2005, banyak responden pelaku usaha di industri makanan yang mengeluh dengan naiknya biaya produksi dan tidak stabilnya harga bahan baku. Lain kata, kondisi makroekonomi pasca ada kebijakan yang masih dalam proses penyesuaian sangat signifikan mempengaruhi kegiatan produksi mereka. Masalah berikutnya yang dihadapi oleh mereka adalah akses modal untuk meningkatkan skala usaha dan pemasaran produk. Juga masalah pemanfaatan teknologi. Yang menggembirakan, survey menemukan adanya upaya-upaya beberapa responden berkreasi dalam produk yang bisa diterima pasar sebagai langkah untuk meraih konsumen dan membangun citra seperti yang dilakukan oleh industri kue dan roti, keripik dan ragam snack lainnya. Selain itu upaya pembenahan manajemen pemasaran terus dilakukan, termasuk pekan discount. Ini merupakan modal besar untuk mengembangkan usaha dan memenangkan persaingan. Dengan adanya tol Cipularang, ada beberapa responden yang merasa diuntungkan karena pembeli semakin banyak.

Dengan melihat besarnya potensi pengembangan industri makanan di Jawa Barat, bentuk dan arah kebijakan sebaiknya fokus pada riset diversifikasi utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam. Apalagi Jawa Barat khususnya Bandung sudah memiliki image sebagai pusat jajanan dan ragam makanan yang enak. Dan seyogianya hasil riset tentang utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam dapat diterapkan di perdesaan, selain dekat dengan bahan baku, juga diharapkan akan menjadi stimulan untuk berkembangnya ekonomi perdesaan.

Sedangkan keluhan pelaku usaha di sektor bangunan terkait dengan perijinan, semua responden berpendapat bahwa setelah adanya otonomi daerah mengurus perijinan semakin sulit. Masalah perijinan ini ternyata dikeluhkan oleh pengusaha lainnya diluar sektor bangunan. Survey khusus tentang prosedur investasi di Jawa Barat ke 81 pengusaha yang bergerak di sektor *core business* Jawa Barat, ditemukan bahwa jangka waktu penyelesaian yang tidak pasti, biaya yang relatif besar dibandingkan dengan tarif resmi, banyaknya ijin dengan prosedur yang berbelit-belit telah menjadi hambatan realisasi investasi (Dariah dkk, 2006). Beranjak dari fakta ini

sudah sepantasnya Pemerintah Propinsi Jawa Barat menetapkan standar minimal penyederhanaan perijinan yang berlaku untuk kabupaten/kota. Ada dua tawaran untuk merealisasi standar minimal yang dimaksud, yakni sistem perijinan terpadu atau tetap berantai namun dengan koordinasi di satu pintu diantara instansi yang selama ini memiliki kewenangan mengeluarkan ijin.

Berdasarkan temuan-temuan survey di atas, ternyata kunci pengembangan kelima sektor ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan daya beli adalah inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan, dan iklim usaha yang kondusif. Di sinilah bagaimana pemerintah harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi. Pertama, mempertemukan dunia pendidikan dengan pelaku usaha agar riset yang akan dilakukan komunitas akademik selaras dengan kebutuhan dunia usaha sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Kedua, menggapai dunia perbankan agar melakukan diskriminasi besaran suku bunga untuk usaha mikro dan kecil. Ketiga, mendorong kemitraan antara pengusaha mikro, kecil dengan usaha besar yang sejenis untuk mendorong terjadinya transfer teknologi. Keempat, menghapus citra sulitnya birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik secara prima seperti melalui internet, aparatur yang profesional, transparan dan cepat waktu.

5 Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Rendahnya daya beli masyarakat Jawa Barat saat ini dilansir karena pola pertumbuhan ekonomi yang sudah berlangsung lama sampai saat ini bias pada sektor industri pengolahan yang padat modal dan teknologi tinggi seperti industri alat angkut, mesin dan peralatan, sementara sebagian besar masyarakat masih bergelut di sektor pertanian. Masyarakat termarginalkan dalam transformasi ekonomi Jawa Barat karena memiliki keterbatasan akses yang bisa disebabkan karena keterbatasan kapasitas diri dan atau sistem yang kaku (*rigid*) dan tidak pro masyarakat miskin.

Hasil simulasi perhitungan dengan menggunakan metoda SAM (*Social Accounting Matrices*) memperlihatkan bahwa sektor jasa-jasa, sektor industri makanan dan minuman, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran dan sektor pertanian akan berdampak signifikan pada perbaikan daya beli masyarakat Jawa Barat jika mereka tumbuh. Berdasarkan hasil survey, ternyata kunci pengembangan kelima

sektor ekonomi tersebut adalah inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan, dan iklim usaha yang kondusif.

5.2 Saran

Target besaran angka pertumbuhan sektor ekonomi tersebut dan siapa pelakunya perlu terpetakan secara holistik dan jelas yakni memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi. Pertama, mempertemukan dunia pendidikan dengan pelaku usaha. Kedua, menggapai dunia perbankan agar melakukan diskriminasi besaran suku bunga untuk usaha mikro dan kecil. Ketiga, mendorong kemitraan antara pengusaha mikro, kecil dengan usaha besar yang sejenis untuk mendorong terjadinya transfer teknologi. Keempat, menghapus citra sulitnya birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik secara prima seperti melalui internet, aparatur yang profesional, transparan dan cepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atih Rohaeti Dariah dan Yuhka Sundaya. 2005. *Kajian Sektor Ekonomi Yang Berdampak Signifikan Pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Di Jawa Barat*. BAPEDA Jabar. Tidak Dipublikasikan
- Atih Rohaeti Dariah, dkk. 2006. *Penyusunan Rencana Penyederhanaan Prosedur Investasi di Jawa Barat, BAPEDA Jabar*. Tidak Dipublikasikan
- Bank Indonesia Bandung. 2005. *Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Propinsi Jawa Barat Triwulan III 2005*
- Bank Indonesia Bandung. 2006. *Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Propinsi Jawa Barat Triwulan II 2006*
- Bank Indonesia, 2006. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2005*, www.bi.go.id
- Iwan J. Azis. 2006. "Structuring International Perspectives of Post-Decentralization Through A Regional Growth Model". *Makalah Yang Disampaikan Pada Acara Seminar Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Era Desentralisasi di Kantor BI Bandung, 9 Juni 2006*
- Joseph E. Stiglitz. 2000. *Challenges in the Analysis of the Role of Institutions in Economic Development*, <http://www.dse.de/ef/instn/stiglitz.htm>
- Mankiw. 2000. *Macroeconomics*. Fourth edition. Worth Publisher
- Paul Krugmann, Robin Wells. 2006. *Economics*. Worth Publisher
- UNDP. 2001. *Laporan Pembangunan Manusia 200.*, Publikasi Bersama BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia